

ABSTRAK
**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

(Studi tentang verifikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset
Daerah di Kabupaten Banyumas)

. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai jalannya pemerintahan, yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). pajak daerah yang memberikan pendapatan tinggi adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, khusus di Kabupaten Banyumas, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Agar tujuan dari pemungutan pajak berhasil dengan baik, tidak terlepas dari peran serta penegak hukum dan masyarakat, sehingga amanat dari Perda bisa dijalankan.

Permasalahan yang timbul mengenai bagaimana penegakan hukum pajak dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penegakan hukum pajak melalui penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah.

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini menggunakan data dari data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai penegakan hukum melalui penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa DPPKAD memegang peran penting dalam menegakan penagihan BPHTB, dan kesadaran hukum yang tinggi terhadap wajib pajak sehingga target PAD bisa tercapai.

Tindakan yang dilakukan DPPKAD dalam menagih BPHTB dilakukan dengan cara preventif yang dibutuhkan kerjasama dengan wajib pajak, apabila cara tersebut tidak bisa, dilakukan penerbitan SKPKDB. Kedua cara tersebut dilakukan untuk menegakan hukum pajak BPHTB.

Kata kunci : Penegakan hukum, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

ABSTRACT
BILLING THROUGH CUSTOMS LAW ENFORCEMENT ACQUISITION
OF LAND AND BUILDING

(The study of verification Revenue Service and Asset Cash Management
in Banyumas)

Is a source of local tax revenue to fund their nets government is expected to increase revenue. Local tax that provide high income is fees for acquisition of land and buildings, in Banyumas district specific set in regulations No. 1 Year 2011 as Pajak Daerah and Retribusi Daerah. For the purpose of tax collection works well is inseparable from the role of law enforcement and the public, so that the mandate of local regulation unworkable.

The problems that arise regarding how tax law enforcement and the factors that affect the tax law enforcement through billing Customs Acquisition Rights to Land and Buildings conducted by Opinion Department and Treasury and Asset Management.

The date used in this thesis is empirical juridical approach because this study uses data from primary data obtained directly from the taxpayer and secondary data are derived from the materials library.

Specifications are deskriptif analytic research, which gives a detailed description, thorough, and systematic about the reality of the matter, namely the rule of law through billing Customs Acquisition Rights to Land and Building in Banyumas. DPPKAD research results illustrate that plays an important role in enforcing BPHTB billing, and high legal awareness to taxpayers so that revenue targets can be achieved.

Actions taken DPPKAD in charge BPHTB done in a way that required preventive cooperation with the taxpayer, if a way can not be, made publishing SKPDKB. Both ways are done to enforce the tax laws BPHTB.

Keywords: law enforcement, Customs Acquisition Rights to Land and Buildings.